

Pemerintah Fokus Melakukan Reformasi Struktural dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

HM.4.6/185/SET.M.EKON.3/07/2021

Pemerintah Fokus Melakukan Reformasi Struktural dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

Jakarta, 21 Juli 2021

Pemerintah terus melakukan reformasi struktural untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan untuk mendukung transformasi struktural, meningkatkan investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang ini mengatur ketentuan yang sebelumnya tumpang tindih menjadi lebih jelas, mereformasi izin usaha menjadi lebih mudah, membentuk *Indonesia Investment Authority* untuk iklim investasi yang lebih baik, dan merumuskan kembali Daftar Prioritas Investasi.

Di tengah masa pandemi yang penuh tantangan dan memberikan dampak sosial-ekonomi, masih terdapat sinyal positif perekonomian dalam negeri baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Salah satu indikator yang menjadi sinyal positif adalah neraca perdagangan yang telah mengalami surplus lebih dari US\$ 21 miliar pada tahun 2020 dan terus mengalami surplus hingga saat ini. Selain itu, *Foreign Direct Investment* juga telah mencapai sekitar US\$ 7,6 miliar pada kuartal pertama tahun 2021, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US\$ 6,7 Miliar. Capaian ini mencerminkan kepercayaan berkelanjutan dari komunitas investor global.

Meskipun dengan adanya kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat yang diberlakukan saat ini, proyeksi pertumbuhan dari sejumlah lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF dan OECD untuk tahun 2021 masih memberikan pandangan optimis dan menempatkan pertumbuhan ekonomi kita dari 4,3% menjadi 4,9% dan dari 5,0% menjadi 5,8% pada tahun 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam webinar yang diselenggarakan oleh Eurocham bertajuk “Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Reformasi Struktural” secara virtual, Rabu (21/7), mengatakan bahwa fokus Pemerintah selalu melindungi pekerja, perusahaan, UMKM, dan dampak negatif ekonomi akibat pandemi dengan menciptakan iklim bisnis dan investasi yang lebih baik.

“Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu upaya terbaik yang dilakukan Pemerintah agar perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Selain menciptakan iklim bisnis dan investasi yang kondusif serta memperkuat standar lingkungan yang berkelanjutan, Pemerintah juga mendorong transformasi digital,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah mendorong tenaga kerja untuk lebih memahami dunia digital melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan yaitu Program Kartu Prakerja. Program ini telah membekali dengan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan agar berdaya saing dalam dunia kerja bagi lebih dari 8 juta pekerja, pencari kerja dan pekerja yang diberhentikan.

Kemudian pada kesempatan tersebut Menko Airlangga mengatakan bahwa peran sektor swasta sangat penting selama pandemi, misalnya menciptakan banyak peluang bisnis dan memunculkan model bisnis baru. Dalam upaya pemulihan ekonomi untuk sektor swasta, Pemerintah selalu memastikan bahwa mekanisme dukungan untuk membantu bisnis swasta akan tetap ada, terutama selama masa-masa pandemi yang penuh tantangan. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diterapkan akan selalu ditinjau dan dievaluasi.

Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga mengapresiasi dan menyambut baik serangkaian rekomendasi Eurocham kepada Pemerintah untuk memperbaiki lingkungan ekonomi dan bisnis. Pemerintah akan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah pada sektor swasta.

“Saya mendorong para pengusaha untuk memanfaatkan dengan baik lingkungan bisnis baru dan iklim investasi kita yang telah diberlakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menegaskan bahwa undang-undang ini memihak kepada karyawan dan pembuka lapangan pekerjaan. Perizinan berusaha juga menjadi lebih mudah dan saya yakin ada potensi bisnis yang besar terlepas dari tantangan sedang yang kita hadapi,” tegas Menko Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa selain pandemi, Pemerintah juga menangani isu-isu terkait perubahan iklim, mendorong transformasi digital, serta tantangan tenaga kerja, perdagangan, dan investasi. Isu-isu ini akan menjadi fokus Pemerintah Indonesia dalam Presidensi G20.

“G20 merupakan kesempatan yang baik bagi kita semua untuk terlibat dalam penyelesaian global yang berorientasi pada tindakan bersama masyarakat internasional untuk mengatasi tantangan saat ini dan masa depan,” pungkash Airlangga. (Itg/fsr)

**Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto**

Website: www.ekon.go.id

Twitter, Instagram, Facebook, & Youtube: @PerekonomianRI

Email: humas@ekon.go.id

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia